

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG NURYANTA, S.E., M.M.**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **731231**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.836.950.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m ² /40 m ² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000		
2. Tanah Seluas 416 m ² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 832.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m ² /90 m ² di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 800.000.000		
4. Tanah Seluas 66 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 4.950.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	41.000.000
1. MOTOR, HONDA MANUAL Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.375.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	107.752.210
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	1.998.077.210
III. HUTANG	Rp.	99.204.423
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.898.872.787

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.